

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan metode pengelompokan data secara kuantitatif untuk menganalisis dan membandingkan alokasi dan pelaksanaan anggaran sektor pendidikan sebelum dan sesudah diberlakukannya otonomi daerah. Untuk mengetahui dampak dari implementasi kebijakan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya akan digunakan analisis kualitatif. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang memadukan antara metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Penggunaan metode penelitian gabungan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang lebih mendalam dan utuh tentang suatu kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah sekaligus meneliti manfaat kebijakan tersebut.

Penelitian ini memusatkan diri pada pengkajian mengenai analisis alokasi anggaran pendidikan untuk pembiayaan pendidikan dasar dan menengah, baik sebelum maupun sesudah desentralisasi fiskal. Dalam analisis tersebut yang pertama diteliti adalah deskripsi struktur anggaran daerah baik penerimaan maupun pengeluaran, selanjutnya dikaji tentang orientasi belanja daerah khususnya dikaitkan dengan pembiayaan pendidikan dasar dan menengah. Penelitian ini juga mengkaji implikasi dari perubahan alokasi anggaran dan pembiayaan pendidikan tersebut terhadap peningkatan pelayanan pendidikan di daerah penelitian.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal. Data internal adalah data yang berasal dari organisasi dimana penelitian dilakukan, yaitu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi, dan Rencana Kerja Anggaran Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Data

eksternal adalah data yang berasal dari luar organisasi dimana penelitian dilakukan, yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Depkeu, Direktorat Jenderal Anggaran Depkeu, dan dari hasil publikasi baik di media cetak seperti buku, jurnal, majalah dan terbitan lainnya, maupun publikasi melalui internet yang terkait dengan desentralisasi fiskal, pembiayaan daerah maupun pengeluaran daerah bidang pendidikan.

- b. Data primer untuk melengkapi analisis kualitatif, diperoleh secara langsung melalui kunjungan ke instansi-instansi pemerintah di Kota Bekasi dan mendapatkan informasi langsung dari pejabat yang menangani bidang anggaran dan atau pendidikan, yaitu Bappeda Tk. II Kota Bekasi untuk mendapatkan informasi terkait dengan perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi, Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Kota Bekasi, Dinas Pendidikan Kota Bekasi terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan di Kota Bekasi, serta tinjauan langsung ke beberapa SD dan SMP Negeri di lingkungan Kota Bekasi terkait dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) untuk biaya operasional pendidikan yang memberikan manfaat langsung kepada anak didik/siswa. Melalui survey langsung ke daerah penelitian, disamping berguna untuk mendapatkan data-data kuantitatif, peneliti dapat melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh penjelasan atas data-data yang diperoleh sekaligus mendapatkan gambaran tentang seberapa jauh keterlibatan dari masing-masing stakeholder dalam rangka pengalokasian dana belanja daerah untuk pendidikan dasar di Kota Bekasi.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data melalui beberapa metode, yaitu :

1. *Studi Kepustakaan*, digunakan untuk meneliti dan mengkaji berbagai bahan dan dokumentasi yang berkaitan dengan judul, topik, dan pendekatan penelitian tentang desentralisasi fiskal dan alokasi anggaran pendidikan,

termasuk juga untuk mendapatkan pijakan berupa dasar peraturan dan kebijakan yang relevan, serta arah teoritisnya dari penelitian-penelitian terdahulu.

2. *Survey atau Observasi*, digunakan untuk menggali data dan informasi langsung dari pihak-pihak yang berkompeten di daerah obyek penelitian, terkait dengan kebijakan pemerintah daerah setempat terhadap komitmen untuk meningkatkan layanan pendidikan. Penggalan data dan informasi telah dilakukan sejak awal penelitian sampai dengan selesai.
3. *Dokumentasi*, digunakan untuk menelusuri data-data dokumen pendidikan dan penganggarannya terutama yang terkait dengan pokok penelitian, yang diperoleh dari berbagai instansi antara lain adalah Bappeda terkait dengan perencanaan pembangunan daerah dan penganggarannya, Bagian Anggaran Setda terkait dengan APBD, Dinas Pendidikan terkait dengan pelaksanaan dan pembiayaan pendidikan, BPS terkait dengan kondisi statistika daerah penelitian, dan bahkan Sekolah terkait dengan APBS. Dokumentasi penganggaran nasional yang diperoleh dari Ditjen Perimbangan Keuangan dan Ditjen Anggaran Depkeu juga digunakan untuk melihat alokasi dana perimbangan pada masing-masing kabupaten/kota, terutama untuk daerah yang diteliti.
4. *Wawancara Tidak Berstruktur*, dilakukan melalui wawancara langsung dengan sumber data yang berkompeten untuk mendapatkan kejelasan dan justifikasi atas hasil penelitian tersebut. Wawancara dilakukan secara langsung/bertatap muka dan atau melalui telepon dengan informan dengan maksud agar memperoleh gambaran secara lengkap dengan obyek yang diteliti (Bungin, 2003). Untuk menghindari adanya non-response error dan response error, wawancara dilakukan secara formal dan informal sesuai dengan situasi yang dihadapi. Dari hasil wawancara dengan para pembuat kebijakan/pejabat publik diharapkan dapat diketahui bagaimana dan sejauhmana pendidikan menjadi bagian dari visi, misi, dan tujuan sesuai dengan yang tercantum pada rencana strategis suatu daerah. Sedangkan wawancara dengan masyarakat bertujuan untuk melihat sejauh mana keterlibatan dan tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian ini, maka ditetapkan beberapa variabel penelitian, meliputi :

1. APBD Kota Bekasi

Analisis terhadap APBD Kota Bekasi dilakukan dalam rangka memperoleh gambaran tentang kondisi keuangan daerah Kota Bekasi, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

- a. Dari sisi pendapatan, analisis dilakukan untuk mengetahui kontribusi masing-masing komponen-komponen pembentuk pendapatan pada APBD Kota Bekasi yang terdiri dari Penerimaan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (meliputi : DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak), serta Bagian Lain-lain Penerimaan Daerah Yang Sah. Dengan mengetahui besaran masing-masing komponen pembentuk pendapatan tersebut, maka dapat dilihat implikasi dari pelaksanaan desentralisasi fiskal di Kota Bekasi.
- b. Dari sisi belanja, analisis dilakukan untuk mengetahui kebijakan belanja daerah Kota Bekasi yang dioperasionalkan dengan Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. Belanja Rutin digunakan untuk menampung pembiayaan-pembiayaan rutin seperti belanja pegawai (termasuk belanja gaji pokok PNS), belanja barang/operasional perkantoran, serta belanja lainnya. Belanja Rutin ini disebut juga sebagai Belanja Administrasi Umum/Belanja Aparatur Daerah/Belanja Tidak Langsung. Sedangkan Belanja Pembangunan digunakan untuk menampung belanja pegawai yang terkait langsung dengan kegiatan pelayanan publik (dalam bentuk honorarium), belanja operasi/pemeliharaan dan belanja modal. Belanja Pembangunan pada APBD Kota Bekasi disebut pula sebagai Belanja Pelayanan Publik/Belanja Langsung. Belanja sebagai produk dari suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dapat dijadikan kriteria yang paling mudah untuk melihat besarnya komitmen daerah yang tercermin melalui alokasi anggaran yang termuat dalam APBD. Dalam kebijakan belanja, yang harus diperhatikan adalah bukan hanya

seberapa besar pendapatan yang diterima oleh suatu daerah tetapi juga adanya pengelolaan pada pengeluaran daerah itu sendiri.

Data APBD Kota Bekasi yang menjadi sumber analisis adalah APBD tahun anggaran 1997 sampai dengan tahun anggaran 2009. Penetapan periode tersebut dengan asumsi bahwa TA.1997 s.d. TA.2000 mampu mewakili penggambaran kondisi keuangan daerah Kota Bekasi sebelum periode desentralisasi fiskal, sedangkan periode TA.2001 s.d. TA.2009 dapat mewakili kondisi keuangan daerah setelah desentralisasi fiskal. Pembatasan periode tahun anggaran, khususnya untuk periode sebelum desentralisasi fiskal dari TA.1997 s.d. TA.2000 karena secara administratif Kota Bekasi baru terbentuk pada tahun anggaran 1997 sehingga APBD Kota Bekasi ditetapkan mulai tahun anggaran 1997.

2. Alokasi Anggaran Pendidikan di Kota Bekasi

Alokasi anggaran pendidikan merupakan manifestasi dari prioritas kebijakan Pemerintah Kota Bekasi dalam investasi pendidikan pada pembangunan di daerah sebagai akibat penyerahan kewenangan dalam desentralisasi fiskal di Indonesia. Dalam mengukur pembiayaan pendidikan di Kota Bekasi, analisis penelitian akan dioperasionalkan terbatas pada anggaran pendidikan dasar dan menengah, terutama belanja pembangunan/belanja pelayanan publik yang diasumsikan berimplikasi langsung pada peningkatan pelayanan di sektor pendidikan. Latar belakang pengambilan analisis pada program pendidikan dasar dan menengah adalah dengan memperkirakan bahwa fokus terbesar pada alokasi dana pendidikan Kota Bekasi adalah pada program pendidikan dasar dan menengah, karena jumlah penduduk usia sekolah terbesar berada pada usia 5-19 tahun atau berada pada tingkat pendidikan SD, SMP dan SMA.

Tabel 3.1 Banyaknya Penduduk Kota Bekasi menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, tahun 2008

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
0-4	77.121	77.989	155.110	7
5-6	107.496	94.106	201.602	10
7-14	107.281	108.172	215.453	11

(sambungan)

15-19	110.352	111.379	221.731	11
20-24	98.060	101.937	199.997	9
25-29	93.221	82.444	175.665	8
30-34	71.851	89.976	161.827	7
35-39	89.471	99.280	188.751	8
40-44	77.264	88.990	166.254	7
45-49	79.681	82.617	162.298	7
50-54	68.903	51.353	120.256	6
55-59	39.554	31.668	71.222	4
60-64	24.332	21.766	46.098	3
65+	15.930	11.813	27.743	2
Jumlah Total	1.104.721	1.133.996	2.238.717	100

Sumber : BPS Kota Bekasi, pada Kota Bekasi Dalam Angka 2008

Hal ini didukung pula dengan Tujuan Wajar 9 Tahun yang ditetapkan pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, yaitu meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu tinggi dan terjangkau, melalui jalur pendidikan formal dan non formal sehingga seluruh anak usia 7-15 tahun dapat memperoleh pendidikan minimal SMP atau yang sederajat. Bahkan, saat ini Dinas Pendidikan Kota Bekasi sedang merintis program wajib belajar pendidikan 12 tahun.

Untuk mengetahui besarnya kontribusi belanja daerah terhadap pembiayaan operasional pendidikan dasar dan menengah, maka dapat dilakukan dengan membandingkan kontribusi dari sumber pembiayaan lainnya, terutama alokasi pembiayaan pendidikan yang berasal dari Pemerintah Pusat. Dengan perbandingan tersebut juga akan dapat diketahui bagaimana tingkat kemandirian Pemkot Bekasi dalam menjalankan fungsi pelayanan publiknya dilihat dari besar/kecilnya peran Pemerintah Pusat terhadap pembiayaan pendidikan di Kota Bekasi.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Belanja Daerah Kota Bekasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan pemerintah daerah akan dihubungkan dengan era otonomi, dimana terjadi pergeseran wewenang dan tanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang sekarang ini

berada di tangan pemerintah daerah (kota dan kabupaten). Faktor-faktor yang memiliki pengaruh besar dalam kebijakan pemerintah daerah adalah :

- Kinerja DPRD dan Akuntabilitas publik, kewajiban memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Kinerja dan akuntabilitas ini dinilai dengan :
 - Peran serta DPRD dalam proses pembuatan kebijakan belanja
 - Peran DPRD sebagai wakil rakyat untuk menampung dan merealisasikan aspirasi masyarakat,
 - pengawasan DPRD pada kegiatan pemerintahan.
- Dukungan publik, yang terdiri atas aspirasi masyarakat (pendapat umum/hearing/opini dan interaksinya dengan media massa). Aspirasi ini diukur dengan adanya mekanisme dan saluran aspirasi publik yang efektif guna berkomunikasi dengan para pejabat daerah dan tingkat kepuasan masyarakat pada ketersediaan dan kemudahan pendidikan dasar sesuai kebutuhan masyarakat.
- Sikap/komitmen, dalam kaitannya dengan prioritas kebijakan Pemerintah Daerah sikap dari pemimpin selaku pengambil keputusan dan pelaksana (*implementor*) diwarnai oleh kepentingan, nilai dan perilaku para pembuat kebijakan dalam membuat dan melaksanakan kebijakan.

Hal tersebut akan diukur dengan :

- besaran alokasi belanja
- prioritas alokasi belanja

Alokasi anggaran pendidikan dasar dan menengah sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan penuh dengan adanya otonomi dan desentralisasi, sehingga akhirnya kembali pada komitmen politis para pengambil keputusan di daerah. Hal tersebut dikaitkan dengan tingkat keterpaduan dan dukungan yang diberikan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah. Dimana masing-masing daerah tentu terdapat bentuk program dan alokasi anggaran yang bervariasi, yang dari satu daerah dengan daerah lainnya akan diukur dari sejauhmana keterkaitan rumusan visi dan misi daerah dengan

alokasi anggarannya serta kenyataan yang ada di lapangan (kondisi riil) daerah tersebut.

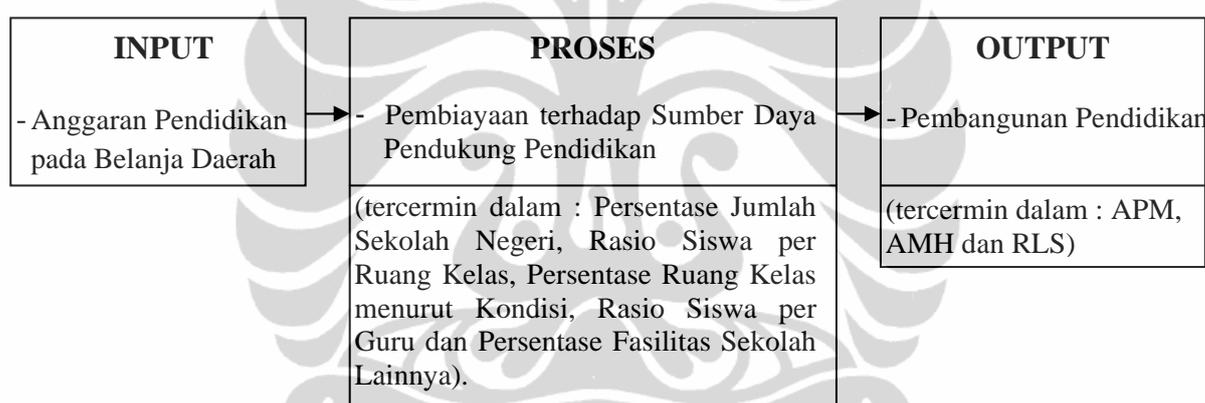
4. Pengaruh Anggaran Pendidikan Terhadap Kesempatan Masyarakat Untuk Memperoleh Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Bekasi

Perubahan kebijakan dalam pemenuhan anggaran pendidikan oleh Pemkot Bekasi seharusnya diikuti pula dengan peningkatan kesempatan bagi masyarakatnya untuk memperoleh pelayanan pendidikan. Peningkatan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan merupakan salah satu wujud dari pencapaian pembangunan pendidikan di suatu wilayah. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator pendidikan, yang diantaranya adalah :

1. Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) di setiap jenjang pendidikan.
Angka Partisipasi Murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk usia yang sama. APM ini menunjukkan tingkat partisipasi sekolah penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut, misalnya APM SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD usia 7 sampai 12 tahun dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7 sampai 12 tahun.
2. Peningkatan Angka Melek Huruf (AMH).
Angka Melek Huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. AMH sering digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf di suatu wilayah, menunjukkan kemampuan penduduk menyerap informasi serta kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis.
3. Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).
Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yg telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yg ditamatkan dan tingkat pendidikan yg sedang diduduki.

Dalam analisis ini, ketiga indikator tingkat pembangunan pendidikan tersebut merupakan bagian dari output dari suatu proses peningkatan pelayanan pendidikan. Sedangkan bentuk dari upaya peningkatan pelayanan pendidikan berupa pembiayaan terhadap sumber daya pendukung pendidikan, yaitu gedung sekolah, ruang kelas, guru, peralatan dan fasilitas penunjang lainnya yang dapat tercermin pada Persentase Gedung Sekolah Negeri, Rasio Murid per Ruang Kelas, Persentase Ruang Kelas menurut Kondisi, Rasio Murid per Guru dan Persentase Fasilitas Sekolah Lainnya.

Selanjutnya, untuk mengetahui sejauh mana pengaruh alokasi anggaran belanja daerah untuk pendidikan terhadap peningkatan kesempatan masyarakat dalam memperoleh pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Bekasi dilakukan berdasarkan kerangka pemikiran analisis sebagai berikut :



3.5 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan terhadap data yang diperoleh, dilakukan dengan menggunakan teknik dan prosedur sebagai berikut :

1. Teknik statistik deskriptif, digunakan untuk mengolah dan membaca data yang diperoleh. Pengolahan data antara lain dilakukan melalui perhitungan analisis rasio dan penghitungan rata-rata per komponen biaya (*average per cost*). Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan diagram yang diharapkan dapat memperkuat interpretasi data dan dapat menggambarkan hasil penelitian sesuai dengan sifat penelitian deskriptif, serta pada akhirnya dapat memenuhi tujuan penelitian dan menjawab rumusan permasalahan.

2. Teknik pengklasifikasian data kualitatif, dengan cara memilah-milah informasi dari hasil wawancara berdasarkan komponen-komponen penelitian yang didiskusikan sehingga informasi tersebut mampu mendukung hasil studi dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, termasuk dalam rangka pengambilan kesimpulan dan pemberian rekomendasi.

3.6 Analisis Data

Dalam penelitian ini, tahapan yang digunakan dalam analisis data meliputi analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif sebagai berikut :

3.6.1 Analisis Data Kuantitatif

Untuk mengetahui dan mengukur tingkat alokasi dana pendidikan, maka analisis data kuantitatif dilakukan dengan dua teknik analisis, yaitu melalui analisis makro dan analisis mikro berdasarkan pendekatan budgeter. Teknik analisis makro dimaksudkan untuk mengungkapkan fakta kondisi pembiayaan sektor pendidikan di daerah, sebelum dan sesudah desentralisasi fiskal khususnya di daerah penelitian. Analisis dilakukan dengan mencari rasio kontribusi antar tahun alokasi biaya sektor pendidikan dalam APBD Kota Bekasi. Perhitungan makro biaya pendidikan didasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari sumber dana. Peranan Pemkot Bekasi untuk memenuhi permintaan akan pendidikan serta keberhasilannya dapat dilihat melalui indikator berupa analisis rasio maupun besarnya dana yang dialokasikan untuk sektor pendidikan. Kontribusi pembiayaan pendidikan dari belanja daerah Kota Bekasi dapat digambarkan dalam rumus :

$\% \text{ Belanja Pendidikan terhadap Belanja APBD} = \frac{\text{Alokasi Belanja Pendidikan}}{\text{Total Belanja APBD}} \times 100\%$
--

Sedangkan untuk mengetahui besarnya kontribusi belanja daerah terhadap pembiayaan pendidikan dasar dan menengah yang terkait langsung dengan biaya operasional pendidikan dasar dan menengah, dapat dilakukan dengan melihat rasio perbandingan belanja pembangunan (belanja pelayanan publik) pendidikan

dasar dan menengah dengan total belanja pembangunan pendidikan pada APBD Kota Bekasi, dengan rumus :

$$\% \text{ Biaya Operasional Pendidikan Dasar/Menengah} = \frac{\text{Belanja Pembangunan Pendidikan Dasar/Menengah}}{\text{Total Belanja Pembangunan Pendidikan pada APBD}} \times 100\%$$

Di samping teknik pendekatan makro di atas juga akan dilakukan analisis dengan teknik pendekatan mikro terhadap pembiayaan pendidikan dasar di daerah penelitian. Analisis mikro dilakukan melalui penelitian terhadap *budget school* yang dituangkan dalam APBS (Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) atau disebut juga sebagai RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah), untuk mengetahui seberapa besar kontribusi alokasi dana pendidikan dari APBD pada APBS terhadap pembiayaan pendidikan yang langsung (*direct cost*) memberikan manfaat untuk siswa. Analisis sebatas untuk melihat besar rasio kontribusi dana pendidikan dari APBD untuk sekolah yang diberikan dalam bentuk dana siswa bebas biaya atau disingkat SBB (Siswa Bebas Biaya) terhadap pembiayaan pada APBS dibandingkan dengan kontribusi pembiayaan dari sumber-sumber dana lainnya pada APBS. Teknik perhitungan rasio SBB terhadap APBS adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kontribusi BOP dari APBD terhadap APBS} = \frac{\text{Alokasi SBB}}{\text{Total APBS}}$$

Setelah mengetahui alokasi pembiayaan pembangunan pendidikan dasar dan menengah, maka berdasarkan asumsi bahwa peningkatan anggaran pendidikan akan diikuti pula dengan perluasan kesempatan masyarakat dalam memperoleh pelayanan pendidikan, analisis akan dilanjutkan dengan melihat perkembangan pelayanan di sektor pendidikan yang tercermin dalam beberapa indikator pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, seperti Persentase Jumlah Sekolah Negeri, Rasio Murid per Kelas, Persentase Ruang Kelas menurut

Kondisi, Rasio Murid per Guru, Persentase Fasilitas Sekolah Lainnya, dan output dari penyediaan sarana dan prasarana pendidikan tersebut berupa indikator-indikator pelayanan atau pembangunan pendidikan, yaitu APM, AMH dan RLS.

Data kuantitatif ini tidak dianalisis dengan statistik inferens, melainkan dengan statistik deskriptif sederhana (persentase, rasio dan perhitungan nilai rata-rata).

Dengan melakukan analisis terhadap alokasi anggaran pendidikan dasar dan menengah serta pengaruhnya pada kesempatan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan pendidikan di Kota Bekasi, diharapkan dapat menjawab masalah penelitian dan mencapai tujuan pertama, kedua, ketiga dan kelima dari penelitian.

3.6.2 Analisis Data Kualitatif

Pendekatan interpretik digunakan dalam menganalisa data kualitatif yang diperoleh, yaitu berusaha memaknai fenomena yang ada. Menurut ahli sosiologi Max Weber (1864-1920) dan filsuf Wilhem Diley (1833-1911) dalam karyanya *Einleitung in die Geisteswissenschaften (Introduction to the Human Sciences (1883))* (dalam Tri Sukmawati, 2007) mengemukakan bahwa ilmu sosial harus mempelajari makna aksi sosial atau aksi sosial dengan tujuan tertentu, merujuk pada verstehen (pengalaman hidup sehari-hari dari masyarakat dengan setting sejarah yang spesifik) dan harus mempelajari motif yang membentuk internalisasi perasaan seseorang dan panduan keputusan untuk bertindak secara khusus.

Analisis data kualitatif selain digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan belanja pemerintah daerah juga digunakan untuk memperkuat penjelasan efek dan dampak kebijakan yang tidak diukur dengan perhitungan model.